

ANALISIS FAKTOR SUMBER DAYA DALAM IMPLEMENTASI PEMERINTAH DESA (UPAYA PENINGKATAN PROGRAM KARTU INDONESIA SEHAT DI DESA CITEUREUP KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS)

DianitaShopa¹, R.Didi Djadjuli², WawanRisnawan³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia.^{1,2,3}

E-mail : dianitashopa2017@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan belum optimalnya faktor sumber daya dalam implementasi pemerintah desa untuk upaya peningkatan program Kartu Indonesia Sehat di Desa Citeureup Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Hal ini dibuktikan dengan kurang adanya keterlibatan Dinas Sosial dalam program Kartu Indonesia Sehat seperti tidak dilibatkannya dalam penyusunan dan pembuatan keputusan program serta dalam pemanfaatan hasilnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor sumber daya dalam implementasi pemerintah desa untuk upaya peningkatan program Kartu Indonesia Sehat pada Desa Citeureup di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yaitu data primer dari 6 orang informan dan data sekunder. Hasil penelitian diketahui faktor sumber daya pada pemerintah desa dalam upaya peningkatan program Kartu Indonesia Sehat pada Desa Citeureup di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis belum optimal, dilihat dalam kemampuan mengembangkan sumber daya yang dimiliki dan petugas program Kartu Indonesia Sehat yang kompeten belum berjalan optimal.

Kata Kunci: Sumber Daya, Program Kartu Indonesia Sehat

PENDAHULUAN

Program Kartu Indonesia Sehat yaitu upaya pemerintah untuk meningkatkan akses layanan kesehatan dan menjadikannya lebih terjangkau. Kebijakan pemerintah terhadap Kartu Indonesia Sehat adalah membantu masyarakat mengurangi beban biaya pengobatan. Kartu Indonesia Sehat yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan merupakan program kesehatan untuk masyarakat untuk menikmati pelayanan kesehatan gratis dan sebagai penunjang kesehatan untuk mencapai tujuan negara sehat jasmani dan rohani, dengan harapan masyarakat dapat dengan mudah memperoleh kesehatan.

Program Kartu Indonesia Sehat yang dikembangkan oleh Presiden Indonesia merupakan kebijakan kesehatan nasional berdasarkan kerangka Jaminan Sosial Nasional. Ketentuan program Kartu Indonesia Sehat dilihat dari Undang-Undang No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Nasional dan Undang-Undang BPJS yang mengatur bahwa masyarakat Indonesia tidak mampu menanggung tanggung jawab negara. Sistem program sosial wajib mencakup asuransi kesehatan, asuransi kompensasi pensiunan dan asuransi kematian.

Landasan hukum program Kartu Indonesia Sehat adalah UU No.40 Tahun (2004) Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 tahun 2011 Tentang BPJS kesehatan. Dalam Undang-Undang tersebut, penertiban Kartu Indonesia Sehat dilakukan sebagai perpanjangan masyarakat miskin yang tidak termasuk Penerima manfaat subsidi iuran. Dalam hal itu, BPJS kesehatan sebagai penyelenggara, dan Kartu Indonesia Sehat adalah programnya. Oleh karena itu, dasar hukum Kartu Indonesia Sehat yaitu undang-undang BPJS

kesehatan dan Undang-Undang Jaminan Sosial Nasional.

Selain itu, berdasarkan keputusan Bupati kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2021 tentang pedoman pembiayaan jaminan kesehatan di kabupaten ciamis, peningkatan pelayanan penambahan dan penghapusan anggota kartu Indonesia Sehat bagi Penerima Bantuan, termasuk dana daerah dan belanja APBD dengan menggunakan sistem informasi kartu Indonesia Sehat Ciamis.

Upaya negara dalam memberikan jaminan sosial di bidang kesehatan telah memasuki tahun kesembilan. Sebelum diluncurkannya skema JKN pada 1 Januari 2014, pemerintah telah menginisiasi berbagai upaya jaminan kesehatan. Diantaranya adalah jaminan sosial bagi PNS, pensiunan, jaminan sosial bagi pekerja negeri dan swasta, perlindungan kesehatan bagi TNI, serta Polri dan Jamkesmas bagi masyarakat miskin. Semua perlindungan ini berada di bawah yurisdiksi Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan. Pada 1 Maret 2023, BPJS Kesehatan melaporkan angka kepesertaan Kartu Indonesia Sehat mencapai 90% dari total penduduk Indonesia. Bukan hanya soal pertanggunggunaan saja, namun jaminan kesehatan yang diberikan pemerintah juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menunjang kehidupan bermasyarakat yang sejahtera. Dengan adanya kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pemegang Kartu Indonesia Sehat, diharapkan masyarakat tidak ragu lagi untuk berobat sebagai peserta Kartu Indonesia Sehat.

Namun setelah melakukan observasi di lapangan fenomena yang timbul di Desa Citeureup Kecamatan Kawali tentang implementasi program Kartu Indonesia Sehat masih memiliki kendala atau hambatan. Permasalahan yang dihadapi tersebut yaitu sebagai

berikut :

1. Masih kurangnya komunikasi dari pihak pelaksana yaitu pihak pemerintah Desa Citeureup kepada masyarakat untuk mensosialisasikan atau menginformasikan mengenai pelaksanaan program Kartu Indonesia Sehat, sehingga masyarakat Desa Citeureup tidak mengerti dan memahami terhadap program tersebut yang menyebabkan pelaksanaan program tersebut diartikan sebagai sarana bantuan pemerintah atau sebagaian masyarakat tidak menerima baik program tersebut.
2. Masih kurangnya sumber daya manusia, dalam pelaksanaan program Kartu Indonesia Sehat seperti melakukan pendataan dalam kurun waktu kurang lebih satu bulan kurang memadai sedangkan petugas jumlah sedikit dan tidak hanya mengerjakan program Kartu Indonesia Sehat saja.
3. Kurang memadainya sikap pelaksana atau disposisi, dalam pelaksanaan program Kartu Indonesia Sehat para pelaksana program kurang efektif sedangkan apabila ada pendataan Kartu Indonesia Sehat tidak segera diselesaikan karena terlanjur oleh pekerjaan lain.

Ini adalah langkah penting dalam pengambilan kebijakan. Ada kebijakan bagus juga bisa diambil Pemerintah, namun terlihat kebijakan tersebut tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan negara karena tidak dilaksanakan. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan dari sumber daya dalam pelaksanaan program kartu indonesia sehat di desa citeureup kecamatan kawali kabupaten ciamis.

KAJIAN PUSTAKA

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan memnggunakan sumber daya yang tersedia. Manusia adalah sumber daya penting dalam menentukan keberhasilan proses implementasi. Beberapa aspek dari keseluruhan proses implementasi memerlukan pekerjaan yang disyaratkan oleh pedoman yang ditetapkan. Menurut George C. Edward III sumber daya merupakan hal yang penting, kegagalan yang terjadi dalam implementasi yaitu disebabkan karena staf yang tidak mencukupi ataupun tidak kompeten dibidangnya. Sumber daya manusia merupakan sekumpulan orang yang dikerjakan dalam sebuah organisasi untuk merencanakan serta melaksanakan organisasi agar mencapai tujuan. Implementasi merupakan hal yang penting dalam proses kebijakan.

Menurut Wahab (2008), menyebutkan bahwa “implementasi mencakup proses bergerak menuju kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik. Berhasil atau tidaknya suatu implementasi dapat ditentukan oleh kekuatannya sendiri dalam mengoprasionalakan program yang telah dirancang sebelumnya”.

Menurut George C. Edward III dalam (Agustino, 2022) bahwa model implementasi memiliki indikator yaitu:

1) Komunikasi, 2) Sumber daya, 3) Disposisi, 4) Struktur birokrasi. Selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi adalah alat kebijakan untuk menyampaikan perintah dan arahan dari sumber kebijakan kepada pihak-pihak yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan.

2. Sumber Daya

Sumber daya adalah pentingnya suatu implementasi kebijakan, seberapa baik kebijakan tersebut dirumuskan, jika tidak didukung oleh sumber daya pendukung maka kebijakan tersebut akan sulit diimplementasikan. Maka dari itu sumber daya yang dimaksud yaitu sejumlah staff yang mempunyai kemampuan, informasi, dan fasilitas yang mendukung lainnya.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap para pelaksana yaitu pelaksana perlu menerapkan suatu kebijakan dan juga untuk memotivasi psikologis para pelaksana dalam menjalankan kegiatan. Sifat motivasi tersebut yaitu dengan adanya pemahaman dan pengetahuan, adanya respon dari pelaksana mulai dari implementasi hingga kebijakan itu sendiri.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan kerangka administratif untuk melaksanakan program. Adapun aspek ini, adalah pengelolaan standar dan pemecahan kekuasaan .

Proses kebijakan pemerintah dalam Kartu Indonesia Sehat adalah program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kartu Indonesia Sehat juga bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Penggunaan kartu Indonesia sehat ini disetiap fasilitas medis tingkat pertama dan lanjutan. Kartu Indonesia Sehat merupakan perluasan dari Jaminan Kesehatan Nasional yang dijalankan programnya sebelum BPJS Kesehatan. Apabila ada keluarga yang memegang Kartu Indonesia Sehat itu berarti sudah masuk ke dalam peserta BPJS kesehatan. Kartu Indonesia Sehat adalah program yang terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional, sistem yang

digunakan untuk pelayanan kesehatan Kartu Indonesia Sehat sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional yang bermaksud untuk mengurangi beban kesehatan masyarakat miskin. Kartu Indonesia Sehat dikeluarkan untuk anggota JKN lalu tidak mengubah Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam pelaksanaannya, pemerintah telah menunjuk BPJS kesehatan sebagai pengelolanya. Setiap masyarakat dapat menggunakannya sesuai aturan. Kartu Indonesia Sehat ini memiliki banyak manfaat seperti layanan pencegahan, promosi dan deteksi dini yang dapat dilaksanakan serta diintegrasikan dengan efektif.

Mekanisme Program ini disalurkan oleh Dinas Sosial yang kemudian diberikan kepada masyarakat. Ada syarat untuk mendapatkan Kartu Indonesia Sehat ini yaitu Keluarga bukan pekerja penerima upah, Semua anggota keluarga wajib mendaftarkan seperti dengan data. Bagi warga yang termasuk kategori warga miskin atau warga tidak mampu dan sampai ini belum terdaftar sebagai peserta BPJS PBI serta belum menerima kartu Indonesia sehat memiliki syarat tertentu. Syarat pengajuan bagi anggota keluarga yang tidak mampu yaitu:

- a. Surat keterangan tidak mampu .
- b. Fotocopy kartu keluargadan E-KTP.
- c. Fotocopy akta kelahiran (bagi yang belum mempunyai KTP).
- d. Ceklist kriteria keluarga miskin/ kurang mampu.

Kartu indonesia sehat juga menawarkan layanan pendaftaran online yang bertujuan untuk memudahkan dan nyaman. Dinas sosial ciamis telah merilis aplikasi SIKISMIS (Sistem Informasi Kartu Indonesia Sehat Kabupaten Ciamis) untuk mengelola layanan tersebut. Aplikasi ini sudah terintegrasi dari aplikasi

sistem informasi terpadu satu pintu untuk lauanan kartu PBI APBD namun juga untuk layanan kartu PBI APBN melalui sistem kesejahteraan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis faktor sumber daya dalam implementasi pemerintah desa untuk upaya peningkatan program Kartu Indonesia Sehat di Desa Citeureup Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Menurut George C. Edward III dalam (Agustino, 2022) bahwa tingkat keberhasilan suatu kebijakan: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur birokrasi. Sampel penelitian memilih orang yang berpengetahuan tentang subjek yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti mengambil narasumber /informan berdasarkan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Program Kartu Indonesia Sehat sebanyak 6 informan.

Teknik pengumpulan data terdiri dari studi lapangan yakni wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh hasil wawancara, observasi, dokumentasi, teori serta buku literatur. Adapun teknik analisis data dimulai dari tahap pengumpulan data, reduksi data, display data serta verifikasi atau penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- a. Kemampuan untuk mengembangkan sumber daya yang ada atau yang dimiliki

Kemampuan dalam mengembangkan sumberdaya yang dimiliki pemerintah desa dalam upaya peningkatan Program Kartu Indonesia Sehat di Desa Citeureup Kecamatan

Kawali Kabupaten Ciamis belum terlaksana secara optimal. Hal ini terbukti dari sumber daya pelaksana Program Kartu Indonesia Sehat dilakukan oleh kader atau perwakilan masyarakat serta masih kurang memiliki pengalaman dalam Program Kartu Indonesia Sehat sehingga berdampak pada Program ini.

Adapun hambatan yang dihadapi yaitu dalam Program Kartu Indonesia Sehat di Desa Citeureup oleh aparat desa, karena pemerintahan desa tidak mempunyai aparatur yang mampu menjalankan fungsi administrasi, sehingga pemerintahan desa diperlukan pemberdayaan dan pengembangan SDM, permasalahannya diantaranya yaitutidak semua desa memiliki teknologi IT atau sarana dan prasarana telekomunikasi secara merata serta kurangnya sumber daya manusia.

Upaya yang dilakukan yaitu melalui pemberdayaan kader baik dari organisasi atau karang taruna untuk membantu pengelolaan Program Kartu Indonesia Sehat. Tujuan sumber daya manusia yaitu mencapai pembangunan dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Jadi perlu adanya upaya peningkatan untuk kemampuan mengembangkan sumber daya yang dimiliki oleh aparat pemerintah Desa Citeureup Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Sebagaimana dikatakan oleh (Syahrudin, 2017) bahwa “Sumber daya, proses implimentasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang ada, baik manusia maupun non manusia”. Sehingga kemampuan dalam mengembangkan sumber daya yang di miliki oleh aparat pemerintah Desa Citeureup karena tidak semua aparatur memiliki pengalaman dalam menjalankan fungsi administrasi, dan tidak semua desa memiliki teknologi IT ataupun sarana dan prasarana telekomunikasi secara merata.

b. Petugas program Kartu Indonesia Sehat yang kompeten

Petugas program Kartu Indonesia Sehat yang kompeten di pemerintah Desa Citeureup Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis belum optimal. Hal ini terbukti dari kurangnya peningkatan sumber daya manusia aparat pemerintah desa dan jumlah sumber daya manusia yang menguasai dalam bidang IT sehingga berdampak pada penyelesaian pekerjaan terutama dalam pelayanan masyarakat untuk penginputan data penerima bantuan Kartu Indonesia Sehat.

Adapun hambatan yang dihadapi yaitu dalam Program Kartu Indonesia Sehat di Desa Citeureup oleh aparat desa, karena tidak semua memiliki punya pengalaman dalam menjalankan fungsi administrasi, dan masih terbatasnya jumlah sumberdaya manusia yang menguasai dalam bidang IT sehingga berdampak pada penyelesaian pekerjaan terutama dalam pelayanan masyarakat untuk penginputan data penerima bantuan Kartu Indonesia Sehat.

Upaya yang dilakukan yaitu melalui pemberdayaan SDM pemerintahan desa, yang berkelanjutan dari semua lapisan masyarakat yaitu melalui pelatihan pengadministrasian, pelatihan pengenalan IT dan lainnya. Kurangnya petugas program Kartu Indonesia Sehat yang kompeten di Desa Citeureup. Sebagaimana dikatakan oleh Wahab (2008), bahwa “implementasi mencakup proses bergerak menuju kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik”. Jadi kurangnya peningkatan sumber daya manusia aparat pemerintah desa karena terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang menguasai dalam bidang IT sehingga berdampak pada penyelesaian pekerjaan untuk penginputan data penerima bantuan Kartu Indonesia Sehat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ditarik kesimpulan bahwa analisis faktor sumber daya dalam implementasi pemerintah desa untuk upaya peningkatan program Kartu Indonesia Sehat di Desa Citeureup Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis belum berjalan optimal. Masih ada indikator yang belum dilaksanakan dengan baik, sehingga implementasi belum berjalan secara optimal.

Adapun hambatan yang dihadapi pemerintah desa, kurangnya dalam kemampuan untuk mengembangkan sumber daya yang dimiliki kurangnya sumber daya manusia yang melakukan pendataan Program Kartu Indonesia Sehat yang mana petugasnya hanya ada 1 orang sedangkan yang dilayani banyak, tidak semua desa memiliki sarana dan prasarana telekomunikasi secara merata. Sehingga berdampak pada penyelesaian pekerjaan dengan optimal.

Upaya mengatasi hambatan tersebut yaitu pemberdayaan kader baik dari organisasi atau karangtaruna untuk membantu pengelolaan Program Kartu Indonesia Sehat dan penguatan sistem sumber daya manusia bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dari semua lapisan masyarakat yaitu melalui pelatihan pengadministrasian, pelatihan pengenalan IT dan lainnya. Disarankan pemerintah Desa citeureup melaksanakan program kartu indonesia sehat dan mempertimbangkan dimensi implementasi yang dilaksanakan. Pentingnya evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program implelementasi untuk melaksanakan program ini oleh kader masyarakat dilakukan sesering mungkin agar mampu mengoptimalkan data hasil secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2022). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Hayat. (2018). *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok: Rajawali Pers.
- Mulyadi, D. (2015). *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mutiarin, D. (2014). *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik "Formulasi Implementasi dan Evaluasi"*. Jakarta: Gramedia.
- Pasolong, H. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta CV.
- P. B. (2022). *Perubahan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembiayaan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Ciamis*
- Sabatier, M. D. (2014). *Implementasi Kebijakan publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrudin. (2017). *Implementasi Kebijakan publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- U. N. (2011). *BPJS kesehatan*. Jakarta: Menteri Kesehatan.
- Wahab, A. (2008). *Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno. (2005). *Manajemen Tenaga Kerja*. Bandung: Sinar Baru
- Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional